

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. Bandung; PT.Citra Aditya Abadi Bakti.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta; Kencana
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta; Sinar Grafika
- A Goldsmith, D Gray, and R G Smith, 2014, *Criminal Asset Recovery in Australia*.
- Akil Mochtar. 2006. *Memberantas Korupsi: Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Jakarta; Q-Communication
- Amir Ilyas dan Muhammad Nursal. 2016. *Kumpulan Asas-Asas Hukum*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1986. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung; Binacipta
- 1985. *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Andi Nurfitriana et al. 2023. *Barang Rampasan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik)* Jakarta; Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia.
- A. Patra M. Zen. 2021. *Perlindungan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik atas Harta Kekayaan dalam Perkara Pidana*. Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Artidjo Alkostar. 2008. *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta; FH UII Press.
- Baharuddin Lopa. 1987. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Berikut Pembahasan Serta Penerapannya Dalam Praktek*. Bandung: Alumni
- Bambang Poernomo. 2000. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung; Citra Aditya Bakti.

- Brenda ratland. 2009, *Aset ForFeiture: Rules and Procedures*. Washington D.C.; ForfeitureEndangers American rights (FEAR)
- Darwan Prints. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta; Penerbit Jambatan
- Hamzah, Andi. 1986. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung; Binacipta.
- Hans Kelsen. 1978. *Pure Theory of Law*. London; University of California Press.
- Harris Arthur Hedar, et.al. 2024. *Perampasan Aset Hasil Kejahatan Menurut Hukum Pidana Ekonomi, Korupsi, dan Pencucian Uang Suatu Studi Komparatif*. Jogjakarta; Karya Bakti Makmur (KBM)
- Hartiwiningsih dan Lushiana Primasari. 2017. *Hukum Pidana Ekonomi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- H.P. Panggabean. 2020. *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi. Teori Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Henry Campbell Black. 1999. *Black's law dictionary*. Vol. 196. St. Paul; West Group.
- Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta; Mira Buana.
- John Rawls. 1999. *A Theory of Justice. Revised Edition*. Massachussetts; The Belknap Press of Harvard University of Press.
- Muhammad Yusuf. 2013. *Merampas Aset Koruptor*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Mardjono Reksodiputro. 1977. *Bungai Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan. Buku Kelima. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Universitas Indonesia.
- . 2007. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan*. Buku Ketiga. Jakarta; Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Moh. Taufik Makaro. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung; Refika Aditama.
- M. Yahya Harahap. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*.

Jakarta: Pustaka Kartini.

-----, 2019. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Ni'matul Huda dan Sri Hastuti Puspitasari (ed.). 2007. *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof.Dr. Moh. Mahfud MD, SH. Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*. Yogyakarta; FH UII Press-Pascasarjana FH UII

P.A.F Lamintang. 1984. *Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Jurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung; Sinar Baru.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2. Jakarta; Kencana.

P.L. Wery. 1990. *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland, Percetakan Negara*. Jakarta:Percetakan Negara.

Poerwadarminata. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Ridwan Khairandy. 2017. *Itikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum*. Jakarta: FH UII Press.

-----, 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.

Rizky Ramadhan Barried. 2021. *Alternatif Penyelesaian Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik*. Jakarta; FH UII Press.

Rusli Muhamad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jogjakarta; UII Press

R. Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa

R. Wiyono. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta; Sinar Grafika.

Satjipto Raharjo. 2014. *Ilmu Hukum* (Satjipto Rahardjo 2), Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Walter Laquer and Barry Rubin. 1979. *The Human Rights Reader*, Newyork; New American Library.

Wilk, Kurt (Translator). *Twentieth Century Legal Philosophy Series: Vol IV, The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Cambridge: Harvard

University of Press, 1950.

Widodo Dwi Putro, et al. 2016. *Pembeli Beritikad Baik, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah*. Jakarta; Puslitbang Mahkamah Agung.

Yesmi Anwarl dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*. Bandung; Widya Padjajaran.

Yunus Husein. 2019. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta; Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdi) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Zainal Arifin Mochtar dan Eddie O.S Hiariej. 2023. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

JURNAL

Abdul Latif. 2010. *Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil*. Jurnal Konstitusi. Volume 7 Nomor 1.

Aby Maulana. 2015. *Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada Jalur Khusus Menurut RUU Kuhaap dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara*. Jurnal Cita Hukum [Online]. Volume 2 Nomor 1.

Achmad Ali. 1983. *Sekelumit Tinjauan Tentang Hubungan Antara Azas Audi Et Alteram Partem Dengan Azas – Azas Lainnya Dalam Hukum Acara Perdata*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Volume 13 Nomor 6. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Alfonsus Nahak. 2023. *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch*. Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora. Volume 18 Nomor 3.

Anna Sakellaraki, 2022, *EU Asset Recovery and Confiscation Regime – Quo Vadis? A First Assessment of the Commission's Proposal to Further Harmonise the EU Asset Recovery and Confiscation Laws. A Step in the Right Direction?*, New Journal of European Criminal Law 13, <https://doi.org/10.1177/20322844221139577>. no. 4,

Atip Latipulhayat. 2017. *Editorial: Due Process of Law*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Bandung.

- Bachtiar Baital. 2015. *Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I. Volume 2 Nomor 2. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Dwi Handayani. 2020. *Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Al Alteram Partem Dalam Perkara Perdata (Philosophical Study of The Principle of Audi et Alterm Partem in Civil Cases)*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Volume 14 Nomor 2.
- Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. 2018. *Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online*. Jurnal Kertha Semaya, Volume. 6 Nomor 8.
- Huda, Muhammad Nurul, Safira Ila Mardhatillah, et.al. 2025. *Non-Conviction-Based Asset Forfeiture: Presumption of Innocence and Principle of Legality Perspective*. Walisongo Law Review (Walrev) , Volume 7 No. 1. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo. Semarang.
- Luhut M.P. Pangaribuan. 2004. *Interpretasi Pihak Ketiga yang Berkepentingan Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Kajian Putusan Pengadilan LeIP. Edisi 2.
- Melisa Citra Wardhani & Zakki Adlhiyati. 2021. *Studi tentang gugatan Intervensi Tussenkomst pada Gugatan Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 548/Pdt.G/2015/PN.Sby)*. Jurnal Verstek. Volume 9 Nomor 1.
- Michael Barama. 2016. *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Pekermembangan*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume III Nomor 8. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Muhammad Muhdar, 2020, *REKONSTRUKSI BASIS PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERISTIWA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SEKTOR SUMBER DAYA ALAM*, De Jure 12.
- Muhammad Nur Ibrahim. 2016. *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi*, e Jurnal Katalogis. Volume 4 Nomor 5. Pascasarjana Universitas Taduluko. Palu.
- Nanda Sahputra Umara. 2017. *Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang Dalam Penguasaan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Novelty. Volume 8 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Jogjakarta.
- Nur Aziza, et al., 2025, *Psychological Victims Recovery of Crime within Contemporary Restorative Justice: An Islamic Legal Perspective*, Metro Islamic Law Review (MILRev), Vol. 4 No. 2, Fakultas Syariah, Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung.

OECD, 'Confiscation of Instrumentalities and Proceeds of Corruption Crimes in Eastern Europe and Central Asia', *Confiscation of Instrumentalities and Proceeds of Corruption Crimes in Eastern Europe and Central Asia*, 2018, doi:10.1787/78637cac-en

Orin Gusta Andini et al., 2025, *Human Rights Protection for the Third-Party in Non-Conviction Based Asset Forfeiture: A Comparison of Indonesia and Australia*", Volume 6, no. 2,

Rudy Hendra Pakpahan dan Aras Firdaus. 2019. *Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum Dan Ius Constituendum*. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 16 Nomor 3.

Robert Alexy. 2021. *Gustav Radbruch's Concept of Law*. Law's Ideal Dimension. Volume 26 Nomor 1946.

Shalsali Amelia Ketaren. 2025. *Upaya Kasasi Yang Diajukan Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Berkaitan Penyitaan Barang Bukti Dari Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/PID.SUS/)*. Jurnal Darma Agung. Volume 33 Nomor 1. LPPM Universitas Darma Agung. Medan.

Stefan Magen. 2015. *Philosophy of Law*. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences; Second Edition. Volume 18.

Tamara Laurencia. 2019. *Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Due Proces Of Law*. Jurnal Mercatoria. Volume 12 Nomor 2. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area. Medan.

Tromme, Mat, Abby Buttle, et. Al. 2019. *Waging War Against Corruption in Developing Countries: How Asset Recovery Can Be Compliant With the Rule of Law*. Duke Journal of Comparative & International Law 29.

Tri Indah Sakinah dan Benny Sumardiana. 2025. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Policy Concept Through In Rem Lawsuit Based on Economic Analysis of Law*. Reformasi Hukum. Volume 29 No. 1.

Widyani Putri. 2020. *Alasan Mengapa Bezit Dapat Perlindungan Hukum*, *Jurnal Gema Keadilan*. Volume 7 Edisi 1. LPM Gema Keadilan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

DISERTASI

Elisabeth Sundari. 2010. *Modifikasi prosedur class action di Indonesia melalui pendekatan keadilan dan efisiensi*. Disertasi. Yogyakarta; Universitas

Atma Jaya

Lukman Hakim. 2021. *Perlindungan Hukum Barang Bukti Milik Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penuntutan*. Disertasi. Fakultas Hukum/Ilmu Hukum, Makassar; Universitas Hasanuddin.

SUMBER INTERNET

Asni Ovier Dengan Paluin. Beritasatu.com. 30 Maret 2021. *Saksi Fakta; Penyitaan Dana Nasabah Wanaartha Merugikan Pemegang Polis*. <https://www.beritasatu.com/nasional/753307/saksi-fakta-penyitaan-dana-nasabah-wanaartha-merugikan-pemegang-polis>. Diakses pada 15 Maret 2025.

Antara. Medcom.id. 3 November 2020. *Penolakan Praperadilan Nasabah WanaArtha Dipertanyakan*. <https://www.medcom.id/nasional/hukum/zNA38o3k-penolakan-praperadilan-nasabah-wanaartha-dipertanyakan>. Diakses pada 15 Maret 2025.

Heru Susetyo. Hukumonline.com. 5 Agustus 2021. *Viktimisasi Terhadap Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Perampasan Aset Tipikor*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/viktimisasi-terhadap-pihak-ketiga-beriktikad-baik-dalam-perampasan-aset-tipikor-lt610bb4999544a>. Diakses 3 Juni 2024.

Hukumonline.com. 19 April 2012. *Kalah Gugatan, KPK Dihukum Rp.100 Juta*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kalah-gugatan--kpk-dihukum-rp100-juta-lt4f90189d450d9/>. Diakses pada 15 April 2025.

Kompas.com. 29 Mei 2020. *Kasus Jiwasraya, Nasabah Wanaartha Ajukan Keberatan Pemblokiran Rekening Efek*. <https://money.kompas.com/read/2020/05/29/120700826/kasus-jiwasraya-nasabah-wanaartha-ajukan-keberatan-pemblokiran-rekening-efek>. Diakses 15 Maret 2025.

Maidah Purwanti. 2022. *Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia*. <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>. Diakses 26 Maret 2024.

News.detik.com. 12 Agustus 2014. *Ini Alasan MA Hukum KPK Atas Permintaan Koruptor Eks Hakim Syarifuddin*. <https://news.detik.com/berita/d-2659705/ini-alasan-ma-hukum-kpk-atas-permintaan-koruptor-eks-hakim-syarifuddin>. Diakses pada 05 April 2025.

Ojk.go.id. *Pointer Permasalahan PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha*.

<https://www.ojk.go.id/id/beritadankegiatan/pengumuman/Documents/POINTER%20%20PERMASALAHAN%20PT%20ASURANSI%20JIWA%20ADISARANA%20WANAARTHA.pdf>. Diakses pada 16 Maret 2025.

Ombudsman.go.id. 10 November 2020. *Ombudsman Minta Sub Rekening Efek Nasabah Wanaartha Dipisahkan*, <https://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-minta-sub-rekening-efek-nasabah-wanaartha-dipisahkan>, diakses tanggal 15 Maret 2025.

Prisma Ardianto. Investor.ID. 27 Mei 2021. *Saksi Ahli: Beritikad Baik, Dana Nasabah Wanaartha Tidak Seharusnya Disita*. https://investor.id/finance/249685/saksi-ahli-kerugian-investasi-jiwasraya-bukan-tanggung-jawab-nasabah-wanaartha#goog_rewarded. Diakses pada 15 Maret 2025.

Yulian. Poskota.co.id. 26 September 2013. *Anis Mata dan Ayu Azhari Jadi Saksi Sidang Fathanah*. <https://www.poskota.co.id/2013/09/26/anis-mata-dan-ayu-azhari-jadi-saksi-sidang-fathanah>. Diakses pada 16 Maret 2025

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST, tanggal 4 November 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 10/PID/TPK/2014/PT.DKI, tanggal 19 Maret 2014 atas nama Ahmad Fathanah Alias Olong

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 Atas Nama Terdakwa Benny Tjokrosaputro

Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar nomor 95/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 76/PUU-X/2012 tanggal 08 Januari 2013 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 021/PUU/2005 tanggal 01 Maret 2006 Pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.